

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifardhani, Yoyo. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta:
- Atmadja, H. A. 2004. *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Hatta Internasional.
- Damian, Eddy. 2022. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Donandi, S. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dodi, G. P. (2022). *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 104-106.
- Handoko, D. (2015). *Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid I)*. Pekan baru: Hawa dan Ahwa.
- Hanifah, I., et al. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ibrahim, J. (2017). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kencana. Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karjono. 2012. *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*. Bandung: Alumni.
- Mayana, R. F., et al. (2022). *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*. Bandung: Refika, 110.
- Permata, R. R., et al. (2022). *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*. Jakarta: Refika.
- Ramli, T. S., et al. (2022). *Hak Cipta Dalam Media Over The Top*. Jakarta: Refika.
- Ranti Fauza Mayana, dkk. (2022). *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*. Bandung: Refika.
- Roisah, K. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang: Setara Press.
- Santoso, A. P. A., et al. (2022). *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: pustakabarupress.
- Sudarmanto. 2012. *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

B. Jurnal

- Alexander R. 2022. First to File Pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya, Depok: Universitas Indonesia.
- Asadullah, A., & Kankanhalli, A. (2018). "Digital *Platforms*: A Review and Future Directions." Twenty-Second Pacific Asia Conference on Information System, Japan, 4.
- Hilmy, M. A. Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna pada *Platform Video on demand* (VOD) Disney+ Hotstar Menggunakan Model DeLone &McLean yang Dimodifikasi (Bachelor's thesis, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Husna, R. el. (2020). "Analisis Klarifikasi Sentimen Pada Twitter Mengenai Netflix Yang Diblokir Oleh Telkom Menggunakan Naive Bayes Classifier Dan Support Vector Machine." Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Kansil, N. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan Perlindungannya di Indonesia. Makalah Seminar Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta.
- Lana A., et al. (2021). "Diferensiasi Hukum Bagi Penyedia Layanan *Over The Top* (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Singapura)". Jurnal Perspektif Hukum, 21(1).
- Lestari E, I, et. Al. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman. Jurnal Notarius Vol. 12 No. 2. Semarang.
- Lobo, L. P., & Wauran, I. (2021). "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal Dalam Hukum Merek Indonesia". Jurnal Masalah Masalah Hukum, 50(1), 81.
- Mahfudzi, I. B. M. A. (2022). Analisis Content Richness, Perceived Usefulness, Perceived Price terhadap Willingness to Subscribe pada *platform streaming* Disney Plus Hotstar di masa Pandemi Covid-19: Studi Di Kota Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Nadirah, I. (2021). "Intellectual Property Rights Law Challenges In New Normal Era." Proceeding International Seminar on Islamic Studies, Jurnal UMSU, 2(1).
- Nadirah, I. (2021). "Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal." Sintesa Cered Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora, Vol. 1, No. 1.
- Nadirah, I., & Waruwu, K. (2023). "Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik." Jurnal USM Law Review, 6(1), 155.

- Napitupulu. 2017. Kajian Merek Pada Fenomena Vaksin Palsu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Purnomo, W. H., Linangkung, O. S., & Susilawati, H. (2024). Analisis Kualitas Layanan Jitter Video *Streaming* Pada Aplikasi Disney+ Hotstar Menggunakan Jaringan Wi-Fi. In Prosiding Seminar Nasional LPPM UNSOED (Vol. 13, No. 1, pp. 286-290).
- Purwaningsih, A. 2006. Paten Sebagai Konstruksi Hukum Perlindungan Terhadap Inovasi dalam Bidang Teknologi dan Industri". Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 24 No. 2. Universitas Yarsi.
- Santoso, B. 2016. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek dagang Terkenal Asing (Well Known Mark) dari Tindakan Passing Off (Studi Sengketa GS Atas Nama GS Yuasa Corporation). Diponegoro Law Journal Vol. 5 No.3. Semarang.
- Satriayuda, L. R. (2024). Analisis User Experience Pada Layanan *Streaming* Disney+ Hotstar Dengan Metode Heart Framework (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Setiawan, A. B. (2018). "Pengembangan Kebijakan Terhadap Penyediaan Layanan Aplikasi dan Konten Pada Ekosistem Digital Melalui *Over The Top*." Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, 8(2), 176.
- Simatupang, K. M. (2021). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(1), 74.
- Slamet, S. R. (2012). "Tuntutan Ganti Rugi Dalam PMH: Suatu Perbandingan Dengan Wansprestasi." Lex Jurnalica, 10(2), 118.
- Sunarto, A. 2017. Dampak Media Sosial Terhadap Paham Radikalisme. Jurnal Nuansa Vol. X No. 2. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
- Taliwongso, R. N. Y. (2014). "Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia." Lex Societatis, II(7), 147.
- Tampubolon, W. S. (2016). "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." Jurnal Ilmiah Advokasi, 04(01), 53.

C. Internet

- Adjust. (2023). "OTT/ *Over The Top* Definisi." [Online] Tersedia: <https://www.adjust.com/id/glossary/ott-Over-The-Top/>.
- Anon. Perlindungan hukum menurut para ahli. [Online] Tersedia: <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

- Geoffrey Parker, Petropoulos, G., & Van Alstyne, M. W. (2020). "Digital *Platforms* and Antitrust." Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3608397>
- Lembaga Sensor Film (LSF). Tentang proses sertifikasi konten dan regulasi sensor yang berlaku di Indonesia. [Online] Tersedia: <http://lsf.go.id/>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Mediasi." [Online] Tersedia: <https://www.pnsengkang.go.id/hukum/mediasi.html>.
- Mas Hushendra, S.H., MH. (Mahkamah Agung Republik Indonesia). "Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Dalam Perkara Praperadilan." [Online] Tersedia: <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html>.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). [Online] Tersedia: <https://pshk.or.id/>.
- Tim Hukumonline (Hukum Online.com). "Upaya Preventif dan Represif Dalam Penegakan Hukum." [Online] Tersedia: <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>.
- Untari, P. H. (Oketechno). "Netflix Jadi Badan Usaha Tetap Bisa Jadi Acuan OTT Lain." [Online] Tersedia: <https://techno.okezone.com/read/2020/01/18/207/2154633/netflix-jadi-badan-usaha>

D. Peraturan Perundang- Undangan

- Pasal 5 Universal Copyright Convention 1952.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2013. [Online] Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Search?jenis=106>.
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor. 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Netflix Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).
- Surat Edaran Menteri no 2 tahun 2016 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI).
- Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 dan 4 Tahun 2022.
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Perdagangan (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk User Generated Content.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.